

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH
BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATKER PJJN WILAYAH I
PROVINSI JAWA TENGAH**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Enggar Abimanyu
12030214060058

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR

NAMA : ENGGAR ABIMANYU
NIM : 12030214060058
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PEMUNGUTAN
PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL ATAS
PEMBELIAN BARANG OLEH
BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATKER PJN WILAYAH I PROVINSI
JAWA TENGAH

Semarang, Mei 2017
Dosen Pembimbing

Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt
NIP. 19690214 199412 2001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti.

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam rangka menyelesaikan Program Diploma III jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Dul Muid, SE., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Arif Pujiyono, S.E., M.Si. Dosen Wali Program Studi Perpajakan 2014 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua ilmu, bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua bantuan informasi selama ini.
7. Ir. H. Aidil Fiqri, MT., selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan magang di kantor Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.
8. Sugeng Riharso, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin, pengalaman selama menjalankan kegiatan magang di bagian Bendahara Pengeluaran.

9. Wahyu Widhyana, Amd., selaku pembimbing lapangan yang juga memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama menjalankan Kuliah Kerja Praktik.
10. Seluruh staf Bendahara Pengeluaran dan seluruh karyawan Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu berjalannya Kuliah Kerja Praktik.
11. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa, motivasi, kasih sayang dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
12. Seluruh teman – teman Diploma III Perpajakan 2014 atas kebersamaan dan bantuan selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini belum sempurna karena keterbatasan yang ada, maka penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan dapat membantu penyempurnaan laporan ini kedepannya. Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Mei 2017

Enggar Abimanyu
12030214060058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.4.1 Bagi Penulis	5
1.4.2 Bagi Universitas Diponegoro	5
1.4.3 Bagi Rekanan Pemerintah	5
1.5 Jenis Data dan Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Data	6
1.5.2 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

2.1 Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9
2.1.1 Logo, Visi, dan Misi Kementerian PUPR	12
2.2 Visi, Misi Dirjen Bina Marga	14
2.2.1 Visi Dirjen Bina Marga	14
2.2.2 Misi Dirjen Bina Marga	14
2.3 Tugas dan Fungsi Dirjen Bina Marga	14
2.3.1 Tugas Dirjen Bina Marga	14
2.3.2 Fungsi Dirjen Bina Marga	15

2.4	Kedudukan Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi	15
2.5	Lokasi Kantor Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	17
2.6	Struktur Organisasi Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Tinjauan Teori	22
3.1.1	Pengertian Prosedur	22
3.1.2	Ketentuan Umum Perpajakan dan Pajak Penghasilan	23
3.1.2.1	Pengertian Pajak	23
3.1.2.2	Fungsi Pajak	24
3.1.2.3	Sistem Pemungutan Pajak	26
3.1.2.4	Jenis Pajak	28
3.1.2.5	Tarif Pajak	30
3.1.2.6	Pajak Penghasilan.....	32
3.1.3	Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22)	33
3.1.3.1	Definisi Umum Pajak Penghasilan Pasal 22	33
3.1.3.2	.Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22	33
3.1.3.3	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	34
3.1.3.4	Objek Pajak dan Bukan Objek PPh Pasal 22	35
3.1.3.5	Dasar dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	38
3.2	Tinjauan Praktik	40
3.2.1	Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan	40
3.2.1.1	Definisi Umum Bendaharawan	40
3.2.1.2	Dasar Hukum Bendaharawan Sebagai Pemungut	40
3.2.1.3	Kewajiban dan Hak	42
3.2.1.4	Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan....	44
3.2.1.5	Sanksi-Sanksi Bendaharawan	46
3.2.2	Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Oleh Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	49
3.2.2.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22	49

3.2.2.2 Alur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan.....	51
3.2.3 Perbandingan Teori dengan Prakti	55
BAB IV PENUTUP.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	19
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Satker PJN Wilayah I	21
Gambar 3.1 Flowchat Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan.....	45
Gambar 3.2 Flowchat Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	20
Tabel 3.1 Tarif Pajak Progresif Orang Pribadi	32
Tabel 3.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	39
Tabel 3.3 Perbandingan Teori dan Praktik.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SSP Lembar ke-1
Lampiran 2	SSP Lembar ke-2
Lampiran3	SSP Lembar ke-3
Lampiran 4	SSP Lembar ke-4
Lampiran 5	SSP Lembar ke-5
Lampiran 6	SPT Masa PPh Pasal 22
Lampiran 7	Daftar Setoran Pajak PPh Pasal 22
Lampiran 8	Bukti Setor Pajak
Lampiran 9	Surat diterima magang
Lampiran 10	Surat selesai magang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya berasal dari sektor pajak.

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1(1), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia, di samping sumber minyak bumi dan gas yang sangat penting perannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (Negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin banyaknya investasi dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan Negara investor, Maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sangat serius untuk mengarahkan dan mengingatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang ada dan menjadi sumber penerimaan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas.

Maka pihak bendaharawan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemungutan PPh pasal 22 yang bersangkutan.

Terkait dari penjelasan diatas, sangat di sayangkan dalam pelaksanaannya PPh pasal 22 sering terjadi penyelewengan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, penyetoran dan pelaporan pajak yang tidak tepat waktu, dimana hal tersebut bisa mengurangi penerimaan Negara dan tidak adanya asas taat pajak yang dilakukan oleh bendaharawan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22 tersebut.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Bina Marga dan Satuan Kerjanya mempunyai peranan yang besar dalam pemungutan PPh pasal 22. Karena Kementerian PUPR merupakan salah satu instansi yang

mengelola masalah pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia dan tentu peran bendaharawan dalam pemungutan pajak khususnya PPh 22 sangat penting bagi penerimaan Negara. Dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan tentunya terdapat berbagai kendala seperti yang telah disebutkan di atas.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pembahasan secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Ruang lingkup pembahasan meliputi:

1. Landasan Teori
 - a. Pengertian prosedur.
 - b. Definisi umum tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Pajak Penghasilan.
 - 1) Definisi tentang pajak.
 - 2) Definisi tentang fungsi pajak.
 - 3) Sistem pemungutan pajak.
 - 4) Jenis pajak.
 - 5) Tarif pajak.

- 6) Pengertian tentang pajak penghasilan.
- c. Landasan teori Pajak Penghasilan Pasal 22 .
 - 1) Definisi umum pajak penghasilan pasal 22.
 - 2) Dasar hukum pajak penghasilan pasal 22.
 - 3) Pemungutan pajak penghasilan pasal 22.
 - 4) Objek pajak penghasilan pasal 22.
 - 5) Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22.
- 2. Tinjauan Praktik
 - a. Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan.
 - 1) Definisi umum bendaharawan.
 - 2) Dasar hukum bendaharawan sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22.
 - 3) Kewajiban dan hak bendaharawan.
 - 4) Tata cara pemungutan.
 - 5) Sanksi penyimpangan yang dilakukan oleh Bendaharawan.
 - b. Prosedur perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 di Satker Jalan Nasional Wilayah 1 Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Perbandingan teori dan praktik.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan penulisan. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui secara umum tentang prosedur.
- b) Untuk mengetahui secara umum tentang perpajakan.
- c) Untuk mengetahui secara khusus tentang pajak penghasilan pasal 22.
- d) Untuk mengetahui pajak penghasilan pasal 22 oleh bendaharawan.

- e) Untuk mengetahui cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 di Satker Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah.
- f) Untuk mengetahui perbedaan antara teori dengan praktik.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Penulis

- a. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi duniaperekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
- b. Penulis dapat mengetahui tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 pada Bendahara Pengeluaran atau instansi pemerintah.
- c. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPh pasal 22.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

1.4.2 Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil laporan ini.

1.4.3 Bagi Rekanan Pemerintah

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak rekanan pemerintah tentang tata-cara perhitungan dan pemungutan PPh pasal 22 yang sesuai dengan peraturan sebagai alat ukur atas pelaksanaan perhitungan dan pemungutan PPh pasal 22 yang selama ini mereka lakukan.

1.5 Jenis data dan Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Data

Penulisan ini tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan buku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh penulis untuk kepentingan penulis. Berikut sumber data yang disajikan dalam laporan kerja praktik ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek pajak yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan Staff Bendahara Pengeluaran Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Dan contoh data sekunder yang diperoleh penulis adalah :

a. Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak digunakan sebagai bukti potong atas PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. Dari SSP dapat diperoleh informasi tentang besarnya pajak yang terutang.

b. Daftar Pemungutan PPh Pasal 22

Dokumen daftar PPh pasal 22 ini berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan rekanan tentang besarnya PPh pasal 22 yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran.

c. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar berisikan tentang nama barang yang dikenakan PPN sekaligus PPh pasal 22 dan jumlah yang harus dibayarkan setelah dikurangi dengan PPN dari faktur pajak ini dapat memperoleh informasi tentang dasar pengenaan pajak yang dijadikan sebagai dasar pemungutan PPh pasal 22.

d. Formulir Setoran Pajak

Formulir yang digunakan oleh Bendahara pengeluaran Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah dalam menyetorkan PPh pasal 22 adalah formulir dari Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia. Dari formulir setoran ini penulis dapat menentukan apakah besarnya PPh pasal 22 yang disetor sesuai dengan PPh pasal 22 yang dipotong seperti yang tercantum didalam SSP dan dokumen tersebut diperoleh dari Bank atau PT Pos Indonesia.

1.5.2 Metode Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan laporan. Metode-metode tersebut adalah observasi atau pengamatan langsung, wawancara, dan studi pustaka, yang dijelaskan sebagaiberikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 di Satker PJN Wilayah I Provisinsi Jawa Tengah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan tanya jawab dengan para staff bagian Bendahara Pengeluaran di kantor Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah dan pihak rekanan.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca buku literatur yang ada hubungannya dengan laporan Tugas Akhir ini. Dengan metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis buku-buku yang terkait dengan perpajakan seperti, Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta buku dengan tema perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan hal-hal mengenai Satker PJN Wilayah I PROVINSI JAWA TENGAH meliputi Visi Misi, Lokasi dan Wilayah Kerja, Tugas dan Struktur Organisasi Satker PJN Wilayah I PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tata cara pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Satker PJN Wilayah I PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang penulis buat berdasarkan data yang diperoleh.

BAB II
GAMBARAN UMUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SATKER PJN WILAYAH 1 PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Sejarah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Pekerjaan Umum, biasa disebut Departemen PU), sempat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004), adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Pekerjaan Umum. Setelah Indonesia memproklamkan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949

mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

- Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kementrian Pekerjaan Umum Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.

- Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang berhubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.

Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu:

1. Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam Kementerian Kemakmuran).
2. Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw
3. Departemen Van Scheepvaart

Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU. RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU. RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang

pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Departemen dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

1. Departemen Listrik dan Ketenagaan
2. Departemen Bina Marga
3. Departemen Cipta Karya Konstruksi
4. Departemen Pengairan Dasar
5. Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

2.1.1 Logo, Visi dan Misi

Lambang Kementerian Pekerjaan Umum



Keputusan Menteri PU No. 150/A/KPTS/1966 Tanggal 10 November 1966.

Ketetapan resmi Lambang Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 150/A/KPTS/1966 Tanggal 10 November 1966. Makna Lambang PU Menggambarkan fungsi dan peranan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berlandaskan Pancasila.

Arti Simbolis Lambang

1. Lambang Kementerian PU berlukiskan baling-baling dengan ketentuan seperti tercantum pada gambar.
2. Warna dasar lambang adalah kuning (kuning kunyit).
3. Warna baling-baling adalah biru kehitam-hitaman.
4. Penggunaan lambang : Lihat Manual Tata Persuratan.

a. Makna lambang ;

1. Baling-baling menggambarkan "DINAMIKA".
2. Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan "STABILITAS".
3. Bagian daun baling-baling yang mengarah keatas malambangkan "penciptaan ruang".

4. Bagian lengkungnya dari daun baling-baling : Memberikan perlindungan untuk ruang kerja dan tempat tinggal bagi manusia.
5. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri dengan bagian lengkungnya yang telungkup Menggambarkan penguasaan bumi dan alam dan pengusahaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Garis Horizontal : bentang jalan / jembatan diatas sungai sebagai usaha untuk pembukaan dan pembinaan daerah.
7. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kanan dengan bagian lengkungnya yang terlentang.
8. Menggambarkan usaha pengendalian dan penyeluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Garis Horizontal : Menggambarkan penampang dari saluran air.
10. Baling - baling dengan 3 daun Ini menggambarkan.
11. Tiga unsur kekayaan Kementerian Pekerjaan Umum, Tirta, Wisma (Cipta) dan Marga.
12. Trilogi Kementerian Pekerjaan Umum, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat.

b. Warna :

Warna Kuning sebagai warna dasar melambangkan Keagungan yang mengandung arti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedewasaan dan Kemakmuran. Warna Biru Kehitam-hitaman mengandung arti Keadilan Sosial, Keteguhan Hati, Kesetiaan pada tugas dan Ketegasan bertindak. Silhouette yang berbentuk dari warna dasar dan lukisan baling-baling membentuk huruf-huruf PU.

Lambang PU menggambarkan fungsi dan peranan Kementerian Pekerjaan Umum dalam Pembangunan dan Pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air serta kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berdasarkan Pancasila.

c. Motto Kementerian Pekerjaan Umum

“Berkerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat”

2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

2.2.1 Visi Direktorat Jenderal Bina Marga

TERWUJUDNYA SISTEM KARANGAN JALAN YANG ANDAL, TERPADU & BERKELANJUTAN DI SELURUH WILAYAH NASIONAL UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2 Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

1. Mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.
2. Mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistic tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional.
3. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalandaerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai.

2.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga

2.3.1 Tugas :

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT :

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2.3.2 Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dirjen Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.4 Kedudukan, Tujuan, Tugas pokok, dan fungsi

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah I ini berkedudukan di Ibu Kota Jawa Tengah dan dipimpin oleh seorang kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (SPJN).

- a. Tujuan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah adalah :
 - Terselenggaranya kelancaran distribusi dan mobilitas orang, barang dan jasa, efektif, efisien dan selaras dengan transportasi di jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
 - Terwujudnya kualitas konstruksi pelayanan yang memadai di Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

- Tercapainya profesionalisme, kemandirian dan akuntabilitas unsur pelaksana Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.
- Terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemeliharaan Jalan Nasional sepanjang jalan Pantura Barat serta jalur selatan Pelaksanaan Jawa Tengah.

b. Tugas Pokok :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jawa Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas mempertahankan kondisi jalan dalam pengembangan wilayah yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruh pelayanan pada sistem jaringan primer dan jembatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis, berdasarkan sasaran dan target yang ditetapkan untuk mencapai manfaat yang optimal dalam menunjang kelancaran distribusi dan mobilitas orang, barang dan jasa di Jalan Nasional Wilayah Pantura Barat Jawa Tengah serta Wilayah Selatan perbatasan dengan Jawa Barat.

c. Fungsi :

- Menyiapkan program kegiatan sesuai dengan jenis penanganannya dalam bentuk Rencana Operasional Kerja (ROK) fisik, keuangan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014 sebagai acuan *monitoring* dan evaluasi kinerja satuan kerja.
- Melaksanakan pekerjaan konstruksi berdasarkan tujuan pembangunan kegiatan satuan kerja dan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan RKAKL tahun anggaran 2014

dengan cara penanganan dikontrakkan dan swakelola, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

- Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja baik yang dilaksanakan oleh kontraktor atau swakelola secara efektif dan efisien.
- Menyelenggarakan administrasi umum, teknis, keuangan dan IKMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan Tata Usaha Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kegiatan Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan profesionalisme, menambah ketrampilan dan memberikan latihan kerja dalam rangka meningkatkan mutu kelembagaan serta kemampuan petugas jalan dan jembatan khususnya dilingkungan SPJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.

2.5 Lokasi dan wilayah Kantor SATKER PJN Wilayah I DIRJEN BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

Lokasi kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Jawa Tengah terletak di jalan Murbei Barat I Sumurboto Semarang. Wilayah ini juga terdapat kantor SATKER PJN Wilayah II, Balai besar PJN Wilayah V, kantor Trans Marga Jateng.

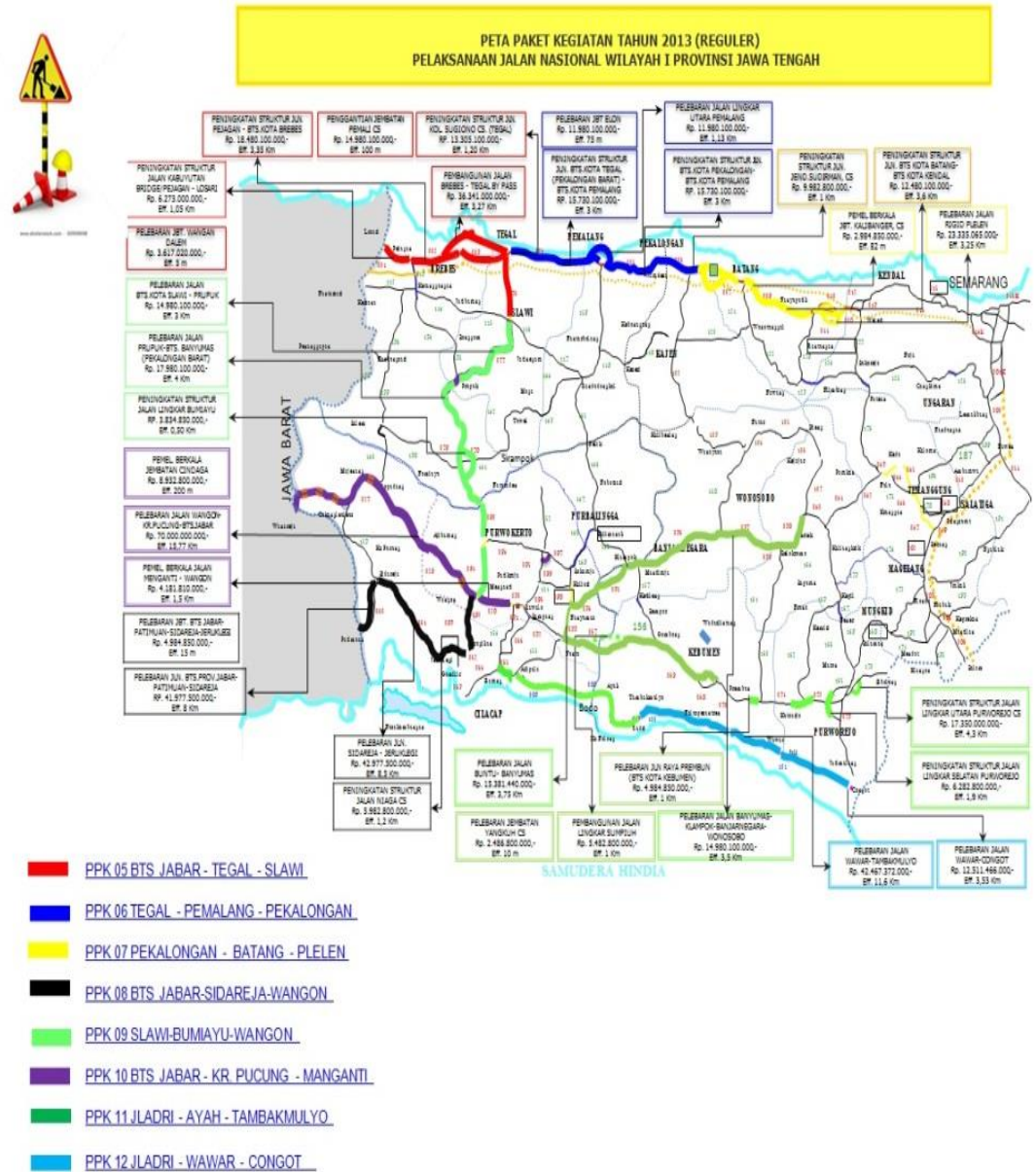
Satker PJN Wilayah I terbagi menjadi 8 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terbagi menjadi 8 wilayah kerja meliputi :

1. PPK 05 : BTS. JABAR – TEGAL – SLAWI (54.99 KM)
2. PPK 06 : TEGAL – PEMALANG – PEKALONGAN (67.35 KM)
3. PPK 07 : PEKALONGAN – BATANG – PLELEN (53.88 KM)
4. PPK 08 : BTS. JABAR – SIDAREJA – WANGON (61.56 KM)

5. PPK 09 : SLAWI – BUMIAYU - WANGON (92.28 KM)
6. PPK 10 : BTS. JABAR – KR. PUCUNG – MANGANTI (64.19 KM)
7. PPK 11 : SLARANG – AYAH – JLADRI (48.71 KM)
8. PPK 12 : JLADRI – WAWAR – CONGOT (28.04 KM)

Gambar 2.1.

Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Keputusan



Sumber : Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah

2.6 Struktur Organisasi

Untuk mendukung kinerja Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 74 pegawai ini terdiri dari PNS (pegawai negeri sipil) dan PTT (pegawai tidak tetap) berbagai struktur berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai berikut :

Tabel 2.1 :

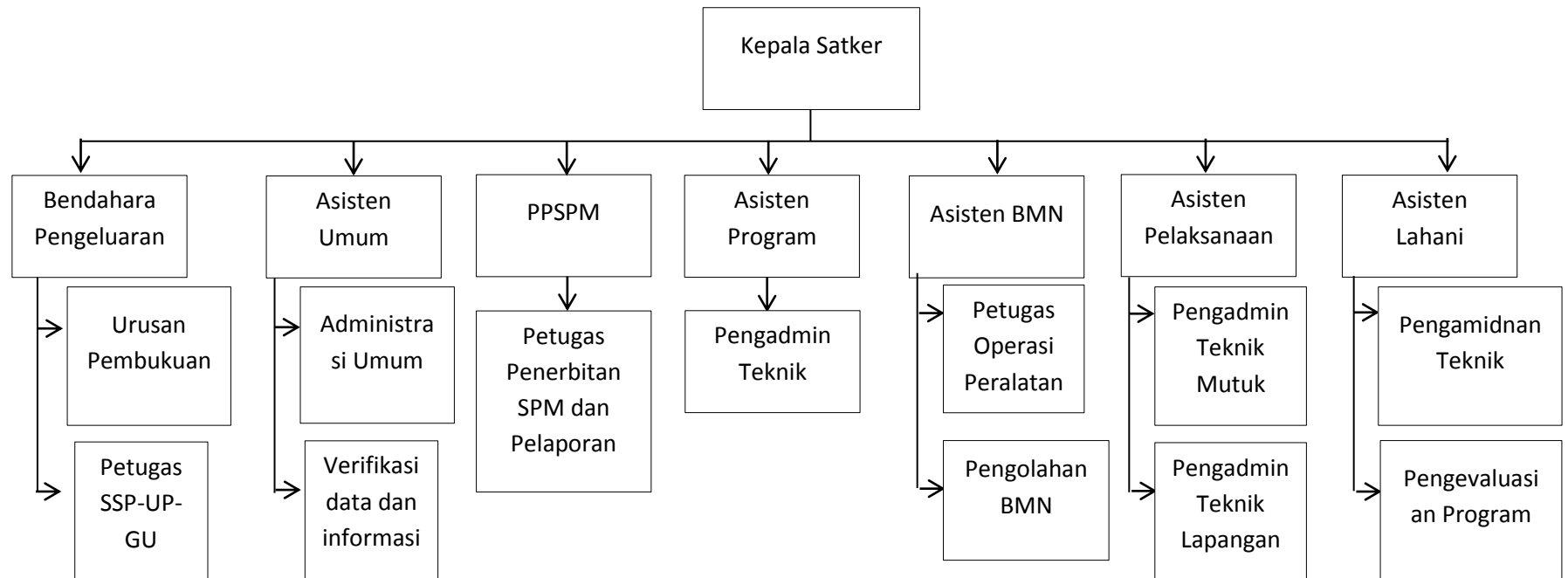
Tabel pegawai Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah

No	Keterangan	Jumlah Pegawai	PNS	PTT
1	Kepala Satker	1	1	
2	PPSPM	7	2	5
3	Bendahara Pengeluaran	7	3	4
4	Asisten Program, Rencana dan Administrasi Teknik	8	3	5
5	Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan	10	6	4
6	Asisten Pengelolaan BMN dan Peralatan	10	5	5
7	Asisten Lahan dan Humas	7	3	4
8	Asisten Umum	25	8	17
Jumlah		74	31	43

Sumber: Surat Keputusan Nomor 04/KPTS/SPJN.I-JTG/I/2017

Gambar 2.2

Struktur Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan teori mengenai pengertian sistem, pengertian prosedur, pengertian pajak, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan, serta tinjauan praktik mengenai prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan atas jasa pembelian barang di Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli:

Menurut Mulyadi (2001:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2000:6) menjelaskan bahwa

A business process is an interrelated set of tasks that involve data, organizational units, and a logical time sequence. Business process are always triggered by some economics event, and all have clearly defined starting and ending points.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa dokumen/ beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan, institusi atau organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

3.1.2 Ketentuan Umum Perpajakan dan Pajak Penghasilan

3.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat berpotensi besar bidang manapun. Pajak yang diambil Negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Resmi (2013:1-2) mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak menurut Rochmat Soemitro.

Pajak adalah iurang rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasatimbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Sedangkan Pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1

ayat (1) berbunyi : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

c. berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Pajak menurut N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 32A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang.
- b. Pembayaran Pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) dipaksakan. pajak dipaksakan apabila wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut, maka terlihat adanya dua fungsi pajak, Resmi (2013:3) yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang makatarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi hidup mewah).
2. Tariff pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula,sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tariff pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2013:11) dapat dibagi menjadi :

a. Official Assessment System

Pengertian Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Fiskus dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparat perpajakan.

Contoh :

- a) PBB
- b) Pajak Kendaraan

b. Self Assessment System

Pengertian Self Assessment Sistem adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

Contoh :

- a) PPH
- b) PPN
- c) PPnBM

c. With Holding System

Pengertian With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Contoh :

- a) Pph Pasal 21 Pegawai
- b) Pph pasal 23 atas jasa

3.1.2.4 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Resmi (2013:7-8) dikelompokkan menjadi 3, Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung antara lain adalah :
 - 1. Pajak Penghasilan (PPh).
 - 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - 3. Pajak penerangan jalan.
 - 4. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung antara lain adalah :
 - 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 3. Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah.
 - 4. Bea Cukai, Bea Materai.
 - 5. Pajak Reklame.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) yang penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kota/kabupaten) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Contoh :

- Pajak Kota/kabupaten :
 1. Pajak Restoran.
 2. Pajak Air Minum.
 3. Pajak Hotel.
 4. Pajak Hiburan.
 5. Pajak Reklame.
 6. Pajak Penerangan Jalan.
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 8. BPHTB
- Pajak Provinsi
 1. Pajak Bermotor dan Kendaraan di atas air.
 2. Bea BalikNama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Dibawah Tanah dan AirPermukaan.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi/keadaan Wajib Pajak sebelum menetapkan objek pajaknya.

Contoh :

Pajak Penghasilan (PPh), dalam PPh terdapat Subjek Pajak (WP) orang pribadi, pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan) keadaan pribadi Wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya PTKP.

b. Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak.

Contoh :

1. PPN
2. PPnBM
3. PBB

3.1.2.5 Tarif Pajak

Resmi (2013:14-16) mengemukakan bahwa Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif Pajak terdiri dari :

1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding

Tariff proposional adalah tariff berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak maka makin besar pula jumlah yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tariff proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tariff 20%), PPh pasal 23 (tariff 15% dan 2%).

Contoh Pengenaan Tarif Proporsional :

- a. $\text{Rp. } 15.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp. } 1.500.000,00$
- b. $\text{Rp. } 25.000.000,00 \times 2\% = \text{Rp. } 500.000,00$
- c. $\text{Rp. } 40.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp. } 6.000.000,00$
- d. $\text{Rp. } 60.000.000,00 \times 20\% = \text{Rp. } 12.000.000,00$

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Contoh : Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00 (PP No. 24 Tahun 2000).

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah Presentase Pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh Pengenaan Tarif Degresif :

- a. $\text{Rp. } 10.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp. } 1.500.000,00$
- b. $\text{Rp. } 25.000.000,00 \times 13\% = \text{Rp. } 3.250.000,00$
- c. $\text{Rp. } 50.000.000,00 \times 11\% = \text{Rp. } 5.500.000,00$
- d. $\text{Rp. } 60.000.000,00 \times 10\% = \underline{\text{Rp. } 6.000.000,00}$

Pajak Terutang Rp. 16.250.000,00

4. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Degresif adalah Presentase Pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi setiap terjadi peningkatan pendapatan tertentu maka tarif yang dikenakan juga meningkat.

Tabel 3.1

Tarif Pajak Progresif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo, Tahun 2011

3.1.2.6 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 UU No.36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam

Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final. Dalam Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 pasal 2 (1) adalah :

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan belum terbagi.

- c. Badan.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu perusahaan yang berada di Indonesia, baik yang dipergunakan oleh orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

3.1.3.1 Definisi Umum Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final (Resmi, 2013:277).

3.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

3.1.3.3 Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan bahwa PPh Pasal 22 dipungut oleh :

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Sesuai dengan PMK No.34 Tahun 2017 tentang pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. BUMN/BUMD, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja Negara dan/atau belanja daerah.
4. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.
5. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
6. Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

7. Industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan. Pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
8. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan antara lain :

1. Penunjukan Pemungut Pajak secara efektif demi pelaksanaan pajak secara efektif dan efisien.
2. Tidak mengganggu kelancaran atau lalulintas barang.
3. Prosedur yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut pemungutan pajak berdasarkan ketentuan dapat bersifat final.

3.1.3.4 Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 22

1. Objek PPh Pasal 22

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK No.34 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Objek PPh pasal 22 adalah :

1. Impor Barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.

3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat membayar yang diberi delegasi oleh KPA .
5. Pembayaran atas pembelian barangdan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industry kertas, industry baja yang merupakan industry hulu, industry otomotif dan industry farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM),dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir.
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportirnya oleh industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah, barang yang sangat mewah tersebut adalah pesawat udara pribadi dengan harga lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kapal pesiar dan sejenisnya yang harga jualnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau pengalihan lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan luas bangunan lebih dari 500M2, apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan

harga jual atau pengalihan lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)dan luas bangunan lebih dari 400M2.

2. Bukan Objek PPh Pasal 22

Pemungutan PPh pasal 22 yang tidak dikenakan PPh pasal 22 atau dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 sesuai dengan PMK No.34 Tahun 2017 Pasal 3 adalah :

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, dan dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh DJBC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

3.1.3.5 Dasar dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas :

1. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yang terdiri atas *cost insurance and freight* (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
2. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga pembelian / penjualan.

Besarnya DPP ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal harga pembelian / penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP PPN sama dengan harga pembelian / penjualan.
- b. Dalam hal harga pembelian / penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , maka DPP adalah :

$$\text{DPP} = (100/110) \times \text{harga pembelian / penjualan}$$

- c. Dalam hal harga pembelian / penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maka DPP adalah :

$$\text{DPP} = (100/ (110 + \text{tarif PPnBM}) \times \text{harga pembelian / penjualan}$$

Tabel 3.2
Tarif pemungutan PPh Pasal 22

No	Objek Pajak	Tarif Pajak
1	Impor barang (menggunakan API)	2,5% x Nilai Impor
2	Impor barang (tidak menggunakan API)	7,5% x Nilai Impor
3	Pembelian barang oleh instansi pemerintah	1,5% x Harga pembelian (tidak termasuk PPN)
4	Penjualan BBM kepada SPBU Pertamina	0,25% x penjualan (tidak termasuk PPN)
5	Penjualan BBM kepada SPBU non Pertamina dan non SPBU	0,3% x Penjualan (tidak termasuk PPN)
6	Penjualan bahan bakar gas	0,3% x Penjualan (tidak termasuk PPN)
7	Penjualan pelumas	0,3% x Penjualan (tidak termasuk PPN)
8	Penjualan kertas	0,1% x DPP PPN
9	Penjualan semen	0,25% x DPP PPN
10	Penjualan kendaraan bermotor	0,45% x DPP PPN
11	Penjualan baja	0,3% x DPP PPN
12	Penjualan barang sangat mewah	5% x harga jual
13	Pembelian bahan keperluan industry	0,25% x harga pembelian (tidak termasuk PPN)

Sumber : Resmi (2013:285-286)

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan adalah pajak yang dipungut berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang didanai dari APBD dan/atau APBN yang pembayarannya dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pusat dan/atau Daerah.

3.2.1.1 Definisi Umum Bendaharawan

Bendaharawan adalah orang-orang atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima, menyimpan, membayar (mengeluarkan) atau menyerahkan uang atau barang-barang milik Negara berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tentang tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBD/APBN adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk dalam bendaharawan pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Bendaharawan pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mengelola APBN/APBD. Kedudukan bendaharawan sama dengan kedudukan Wajib Pajak (WP), sehingga bendaharawan mempunyai kewajiban yang sama dengan WP lainnya, serta mendapatkan sanksi perpajakan jika terjadi pelanggaran.

3.2.1.2 Dasar Hukum Bendahara sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.

Dasar hukum penunjukan bendaharawan sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007
- c. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata cara Pembayaran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- f. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
- g. Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-38/PJ/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
- h. Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutan

- i. Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang tata cara pendaftaran NPWP,

3.2.1.3 Kewajiban dan Hak Bendahara

Sesuai dengan peraturan perpajakan pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemungutan dan/atau pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kewajiban bendahara pemerintah dalam bidang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja yang sesuai dengantempat kedudukan unit kerja. Dan tata cara pendaftaran NPWP Bendahara Pemerintah sesuai dengan Per Dirjen No.PER-44/PJ/2008 tentang tata cara pendaftaran NPWP, alur bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak untuk mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut :
2. Tata cara pendaftaran NPWP
 - a. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotocopy surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 16 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- c. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara unit / satuan kerja, misal Bendahara SATKER PJN Wilayah I DITJEN BinaMarga Provinsi Jawa Tengah dengan NPWP 00.062.428.8-517.000.
- d. Bila terjadi penggantian pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP.
- e. Melakukan pemungutan PPN atas belanja barang dan jasa (nilai pengadaan lebih dari Rp.1.000.000,-termasuk PPN) dengan tarif 10% dari DPP (dasar pengenaan pajak).
- f. Melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang (nilai pengadaan lebih dari Rp.2.000.000,-termasuk PPN) dengan tarif 1,5% dari DPP (dasar pengenaan pajak), apabila rekanan tidak mempunyai NPWP dikenakan denda 100% dan tarif pajak menjadi 1,5%+1,5% (atau 3%) dari obyek PPh pasal 22.
- g. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa dengan tarif 2% dari objek PPh pasal 23, apabila rekanan tidak mempunyai NPWP tarif pajak dikenai denda 100% menjadi 4% dari objek PPh pasal 23.
- h. Melakukan pemotongan PPh pasal 4(2) atas belanja jasa objek PPh pasal 4(2) dengan tarif 2% dari objek PPh pasal 4(2) untuk usaha besar dan 3% dari objek PPh pasal 4(2) untuk usaha kecil.
- i. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas belanja pegawai.

Hak-hak Bendaharawan antara lain :

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau penyuluhan mengenai masalah perpajakan
2. Hak untuk mendapatkan formulir-formulir yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, antarlain Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Pemotongan/Pemungutan, dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diminta di Kantor Pelayanan Pajak secara Cuma-Cuma

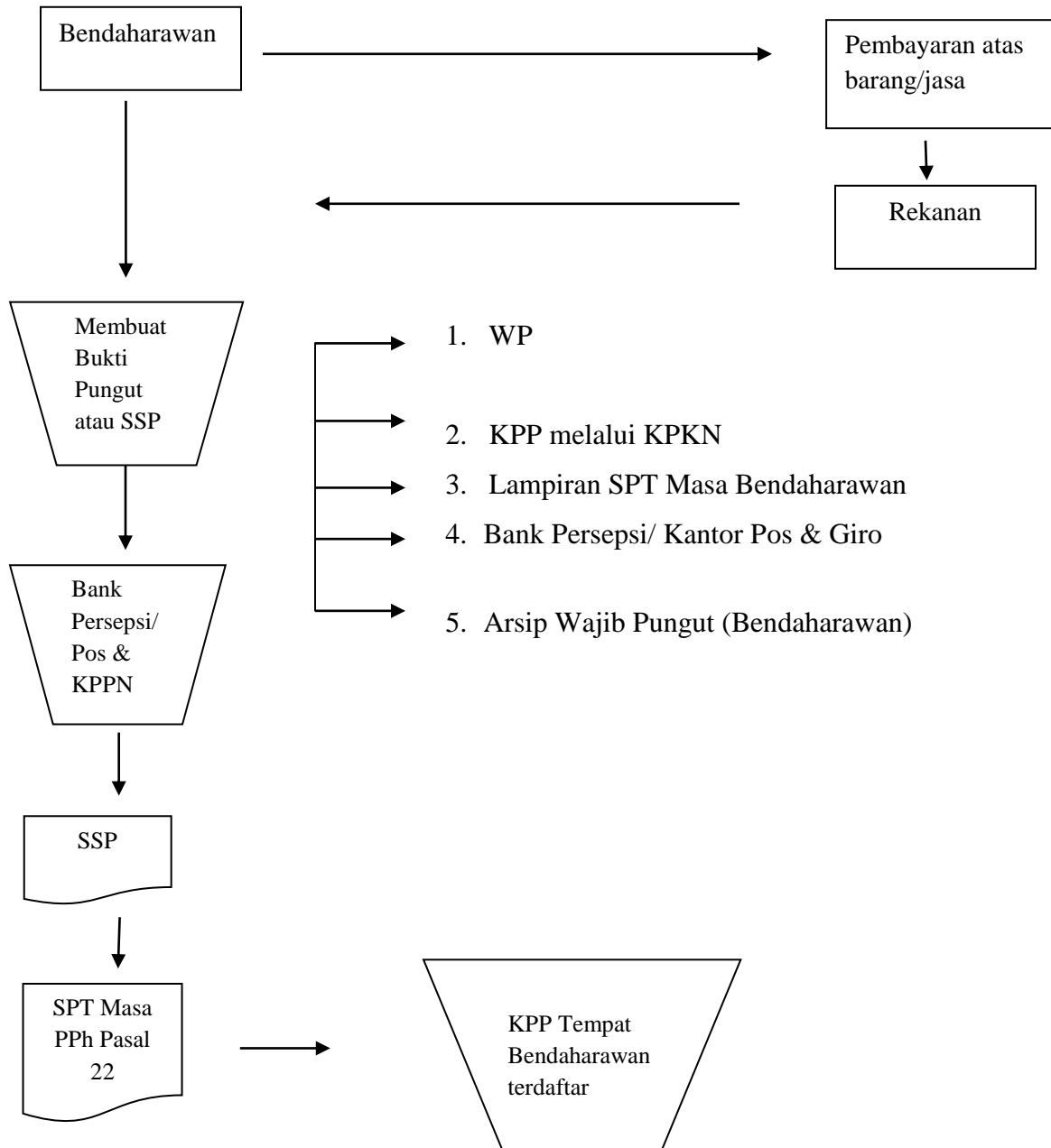
3. Hak untuk pembetulan kesalahan hitung dalam pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak yang menjadi kewajibannya
4. Hak untuk tidak melakukan pembayaran kepada rekanan/Pengusaha Kena Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan

Keterangan :

1. Bendaharaan melakukan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan.
2. Pembayaran dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Bendaharawan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) atas nama rekanan, dengan rincian lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP, lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara Pemerintah).
4. SSP disampaikan ke Kantor Pos & Giro / Bank Persepsi / kantor Perbendaharaan & kas Negara (KPPN), pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran oleh bendaharawan.
5. SSP lembar ke-3 yang dikembalikan saat penyetoran digunakan sebagai lampiran SPT Masa pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus disampaikan ke KPP tempat bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan takwim berakhir.

Gambar 3.1
Flowchat Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan



3.2.1.5 Sanksi sanksi Bendaharawan

Kedudukan bendaharawan adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak (WP) juga berlaku bagi bendaharawan. Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengelolaan keuangan dan setiap penyimpangan akan dikaitkan dengan adanya sanksi hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Sanksi hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Denda, sebesar :

- 1) Rp.50.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
- 2) Rp.100.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

b. Bunga, sebesar :

1. 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang, tidak atau kurang dibayar dalam hal:
 - a) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelumnya dilakukan pemeriksaan.
 - b) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c) Terdapat kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

d) Penghitungan sementara pajak yang terutang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya karena diberikan izin penundaan penyampaian SPT tahunan.

2. 2% sebulan dari pajak kurang bayar dalam hal bendaharawan dieprbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
4. 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

a. Kenaikan, sebesar

1. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
2. 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
3. 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap Wajib Pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang dipotong.

2. Sanksi Pidana

a. Karena Alpa :

- 1) Tidak menyampaikan SPT, atau
- 2) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana kurungan selambat-lambatnya satu tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Dengan Sengaja :

- 1) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.
- 2) Tidak menyampaikan SPT.
- 3) Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- 4) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- 5) Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau
- 6) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3.2.2 Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Palaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah.

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah Kementerian PUPR yang menggunakan dana belanja Negara atau APBN dengan baik untuk membiayai beberapa kegiatan pembangunan jalan maupun pengadaan barang, memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas penggunaan dana tersebut ke Negara. Dalam realisasinya, pengadaan barang tersebut baik untuk barang kebutuhan pembangunan dengan menggunakan dana dari APBN sangatlah besar. Menurut sifatnya barang-barang di instansi ini di kelompokkan menjadi dua golongan besar yaitu barang belanja modal (BM) dan barang habis pakai (HP). Barang belanja modal merupakan jenis barang yang banyak menggunakan dana belanja Negara. Barang belanja modal ini berupa kebutuhan pokok yang digunakan untuk pembangunan berupa aspal, beton, dan lain-lain.

3.2.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah

Berikut ini adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 bahwa pembelian barang oleh pemerintah dikenakan tarif $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$. Harga pembelian itu sendiri memiliki pengertian yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang.

1. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang.

Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah melakukan pembelian bahan baku Aspal kepada PT Prima Performa Yaza untuk persediaan dan pemeliharaan Rutin Jembatan pada PPK Tegal-Pemalang-Pekalongan

pada November 2016 dengan nilai pembelian Rp. 46.200.000 (termasuk PPN). Maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah adalah :

Tarif dasar 1,5% x nilai pembelian (tidak termasuk PPN) :

$$1,5\% \times (\text{Rp. } 46.200.000 / 110 \times 100)$$

$$1,5\% \times (\text{Rp. } 42.000.000) = \text{Rp. } 630.000$$

2. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang (tidak memiliki NPWP).

Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah melakukan pembelian Coldmix 600 Karung kepada Jay Motor Wangon (tidak memiliki NPWP) untuk pemeliharaan Rutin Jembatan pada PPK Tegal-Pemalang-Pekalongan pada November 2016 dengan nilai pembelian Rp. 46.200.000 (termasuk PPN). Maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah adalah :

Tarif dasar 1,5% x nilai pembelian (tidak termasuk PPN) :

$$1,5\% \times (\text{Rp. } 46.200.000 / 110 \times 100)$$

$$1,5\% \times (\text{Rp. } 42.000.000) = \text{Rp. } 630.000$$

Tidak memiliki NPWP :

$$\text{Rp. } 630.000 \times 100\% = \text{Rp. } 1.260.000$$

3. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang tidak kena pajak.

Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah melakukan pembelian 2 buah GB baterai laptop acer kepada CV Anugrah Wijaya untuk keperluan kantor PPK pada November 2016 dengan nilai pembelian Rp. 1.980.000 (termasuk PPN). Maka PPh pasal 22 yang dipungut oleh Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah adalah :

Tarif dasar 1,5% x nilai pembelian (tidak termasuk PPN) :

$$1,5\% \times (\text{Rp. } 1.980.000 / 110 \times 100)$$

$$1,5\% \times (\text{Rp. } 1.800.000) = \text{Rp. } 27.000$$

Maka pajak atas pembelian diatas dibebaskan karena harga pembelian tidak melebihi Rp. 2.000.000.

Sedangkan untuk Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Pemerintah yang telah di atur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 417/PJ/2001.

3.2.2.2 Alur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah

Tata cara Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 bendaharawan adalah sebagai berikut :

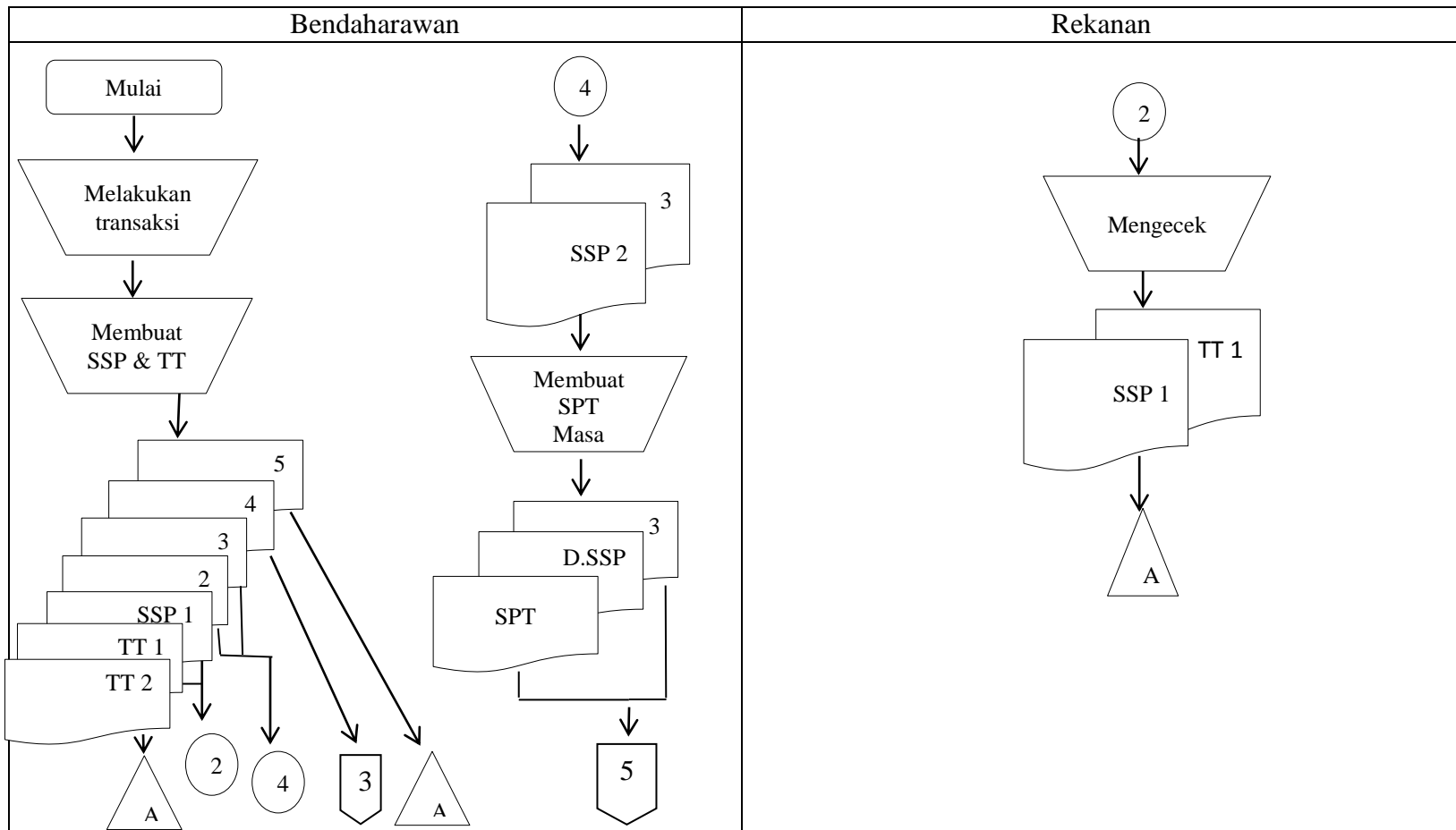
- a. Melakukan transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah dan Bendahara Pengeluaran berkewajiban memungut PPh pasal 22 pada setiap pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh WP (rekanan).
- b. Setelah melakukan transaksi pembelian barang, bendaharawan wajib membuat SSP (Surat Setoran Pajak) dan Tanda Terima sebagai langkah untuk memungut PPh Pasal 22.
- c. Bendaharawan membuat SSP dengan 5 rangkap dan Tanda Terima 2 rangkap.
- d. SSP lembar ke 2 dilaporkan ke KPPN dan 3 dipersiapkan untuk dilaporkan ke KPP.
- e. Membuat SPT Masa Pasal 22 dengan dilampirkan daftar setoran pajak dan SSP untuk di laporkan ke KPP.
- f. SSP lembar ke-1 diberikan ke pihak Rekanan untuk dijadikan pengecekan atas transaksi yang terjadi dan sebagai bukti pungut bagi Wajib Pajak (Rekanan).

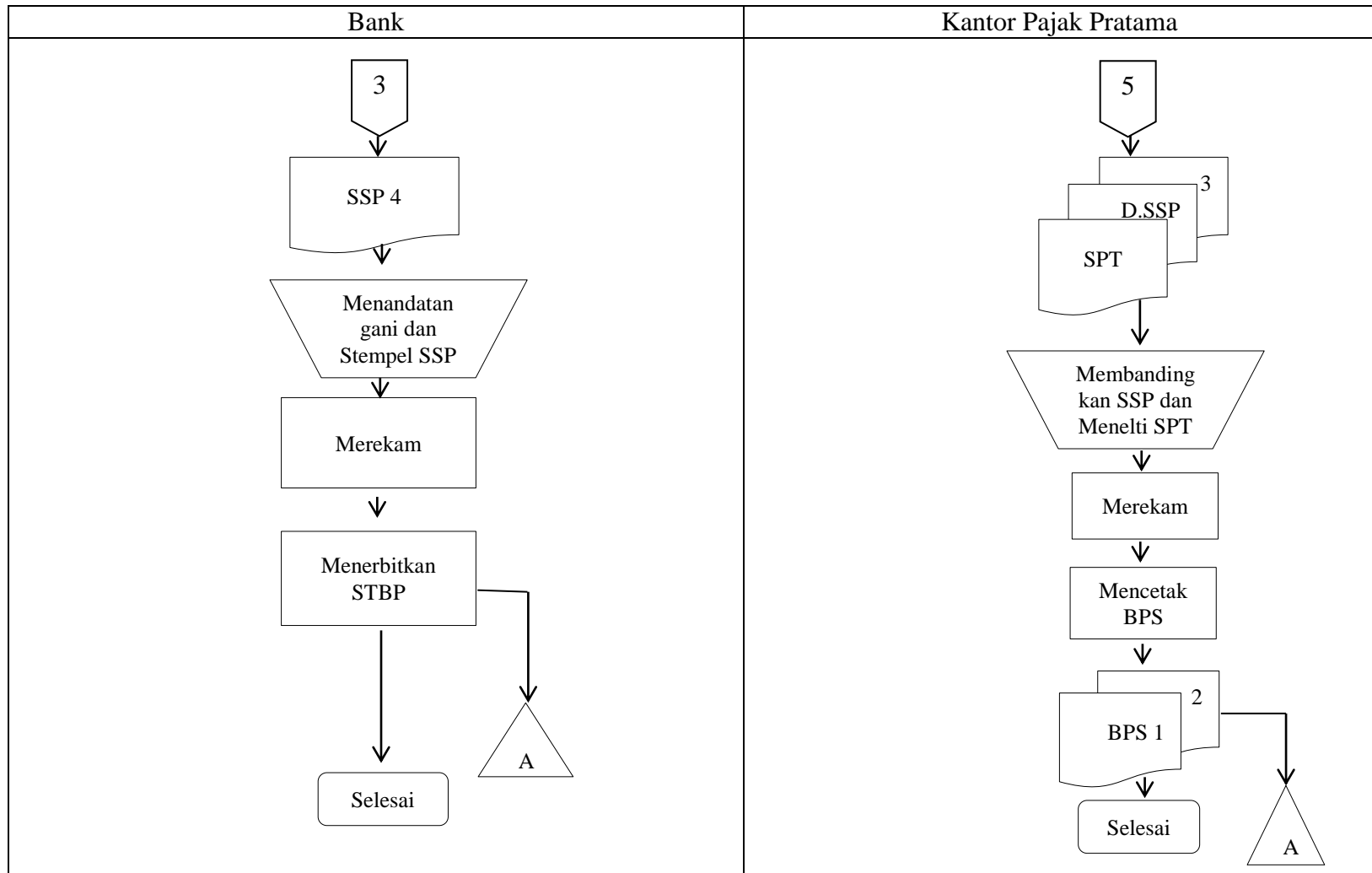
- g. SSP lembar ke-1 untuk pihak rekanan (Wajib Pajak) dijadikan sebagai arsip.
- h. SSP lembar ke-4 dijadikan sebagai alat untuk membayar PPh Pasal 22 di Bank atau Kantor Pos/Giro.
- i. Bank selanjutnya melakukan penandatanganan dan stempel untuk selanjutnya direkam telah membayar PPh Pasal 22.
- j. Bank memberikan STBP (Surat Tanda Terima Bukti Pembayaran) kepada bendaharawan sebagai bukti dan arsip untuk bendaharawan.
- k. Setelah melakukan pembayaran, maka bendaharawan wajib melaporkan ke KPP paling lama tanggal 14 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 disertai lampiran daftar setoran pajak dan SSP lembar ke-3.
- l. Bendaharawan mendapatkan bukti penerimaan dari KPP sebagai tanda bukti dan arsip bahwa telah melakukan pelaporan pajak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, maka disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.2

Flowchat Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah





Sumber : Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah

3.2.3 Perbandingan Teori dan Praktek Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah

Setelah disajikan pembahasan-pembahasan pada sub bab sebelumnya, berikut ini akan disajikan beberapa perbedaan terkait prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan berdasarkan prakteknya pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah. Beberapa perbedaan tersebut akan disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3

Perbandingan Teori dengan Praktikum

NO	PERATURAN/TEORI	PRAKTEK	KETERANGAN
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 bahwa pembelian hasil pertambangan sebelum terjadi pengolahan bukan termasuk Objek Pajak	Pembelian atas kebutuhan operasional dan pembangunan yang berasal dari pertambangan dan hasil pengeboran yang langsung dari sumbernya dikenai PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan	Peraturan yang kurang dapat dipahami oleh pihak rekanan dan bendaharawan
2	Keputusan Dirjen Pajak Nomor 417/PJ/2001 bahwa pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 adalah tanggal 14 bulan berikutnya	Bendaharawan dalam pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 sering terjadi keterlambatan	Tidak teraturnya pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 adalah karena terlalu banyaknya alur dan aturan yang harus diselesaikan sebelum melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22
3	Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 bahwa bagi WP yang tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 dikenai denda administrasi hingga pidana	Bendaharawan yang tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 ataupun terlambat melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 tidak menerima adanya sanksi denda hingga pidana	Proses alur dan aturan yang banyak yang menyebabkan selalu terjadinya keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh pasal 22

BAB IV

PENUTUP

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final (Siti, 2013:277).

Salah satu objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembelian barang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada pihak Wajib Pajak (rekanan). Untuk tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 atas pembelian barang adalah $1,5\% \times \text{Harga Pembelian}$ (tidak termasuk PPN) dengan nilai minimal pembelian Rp.2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan rekanan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan jalan di wilayah Jawa Tengah. Masing-masing rekanan memiliki peranan dalam membantu kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang yang dilakukan oleh Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah oleh pihak rekanan dikenakan tarif $1,5\% \times \text{Harga Pembelian}$ (tidak termasuk PPN), serta prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban melakukan pemungutan pada saat pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan, serta penyetoran PPh pasal 22 ke kas Negara atas PPh pasal 22 yang dipungut melalui bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan realisasi pelunasan atas penyerahan barang. Dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara. Jika rekanan belum memiliki NPWP, maka SSP (Surat Setoran Pajak) cukup diisi dengan angka 0 (nol) .

Terhadap Wajib Pajak rekanan yang dipungut PPh pasal 22 kepadanya diberikan bukti pemungutan berupa SSP (Surat Setoran Pajak) lembar ke -1. Atas pemungutan yang telah dilakukan Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pelaporan pemungutan PPh pasal 22 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 22.

1. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh serta PPN, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi / Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke KPP tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran pajak, Penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Batas waktu pembayaran / penyetoran pajak penghasilan pasal 22 yang sudah dipungut oleh bendahara

pemerintah serta tanggal pelaporan SPT Masa adalah pada saat pembayaran.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 (lima) lembar, yaitu :

- Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak.
- Lembar 2 : Untuk KPPN.
- Lembar 3 : Untuk KPP.
- Lembar 4 : Untuk Arsip Bank Persepsi/penerima pembayaran.
- Lembar 5 : Untuk Arsip Bendahara.

2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Apabila masa pajak telah berakhir, pemungut PPh pasal 22 wajib melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendahara Pengeluaran bertugas.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 22 bulan Oktober 2016, SPT

Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan paling lambat tanggal 14 Nopember 2016.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*

———, *Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

———, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.*

Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran dan Penundaan Pembayaran Pajak.*

———, *Peraturan Menteri Keuangan 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.*

———, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.*

———, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan / atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan / Pemungutan.*

———, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP.*

———, *Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015* tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

———, *Keputusan Menteri PU No. 150/A/KPTS/1966* Tanggal 10 November 1966 tentang Lambang dan Logo Kementerian Pekerjaan Umum.

Bodnar, H. George dan William S. Hopwood. 2000. *Accounting Information System*. 8th Edition: Prentice Hall. New Jersey.


Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.

Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.


Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus 1 Edisi 7*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2010. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.


Lampiran 1

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>																																	
<p>NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT WP :</p>																																			
<p>NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																			
<p>Kode Akun Pajak</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																	
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<p>Tahun Pajak</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																								
<p>Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																			
<p>Jumlah Pembayaran : <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																			
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>....., Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>																													
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																			


Lampiran 2

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 2</p> <p>Untuk KPPN</p>																																		
<p>NPWP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : </p> <p>ALAMAT WP : </p>																																				
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : </p>																																				
<p>Kode Akun Pajak</p> <p></p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p></p>	<p>Uraian Pembayaran : </p> <p></p> <p></p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des													<p>Tahun Pajak</p> <p></p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : </p> <p></p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal </p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : </p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p> , Tanggal </p> <p><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : </p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				


Lampiran 3

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 3</p> <p>Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP</p>																																	
<p>NPWP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT WP :</p>																																			
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																			
<p>Kode Akun Pajak</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px; margin: 2px;"></div>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px;"></div>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																	
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">Jan</td> <td style="width: 8.33%;">Feb</td> <td style="width: 8.33%;">Mar</td> <td style="width: 8.33%;">Apr</td> <td style="width: 8.33%;">Mei</td> <td style="width: 8.33%;">Jun</td> <td style="width: 8.33%;">Jul</td> <td style="width: 8.33%;">Ags</td> <td style="width: 8.33%;">Sep</td> <td style="width: 8.33%;">Okt</td> <td style="width: 8.33%;">Nov</td> <td style="width: 8.33%;">Des</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des													<p>Tahun Pajak</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px; margin: 2px;"></div> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																								
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																			
<p>Jumlah Pembayaran : <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																			
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>....., Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>																													
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																			

Lampiran 4

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto; font-weight: bold;">4</div>																																		
<p>NPWP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT WP :</p>																																				
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																																				
<p>Kode Akun Pajak</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>																																		
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>												Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des													<p>Tahun Pajak</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																									
<p>Nomor Ketetapan : / / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																																				
<p>Jumlah Pembayaran : <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang :</p> <p>.....</p>																																				
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>....., Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas :</p>																														
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																																				
<p>F.2.0.32.01</p>																																				

Lampiran 5

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain</p>																								
<p>NPWP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP : </p> <p>ALAMAT WP : </p>																										
<p>NOP : </p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP : </p>																										
<p>Kode Akun Pajak</p> <p></p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p></p>	<p>Uraian Pembayaran : </p> <p></p> <p></p>																								
<p style="text-align: center;">Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small></p>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des													<p style="text-align: center;">Tahun Pajak</p> <p></p> <p><small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Nomor Ketetapan : / / / </p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																										
<p>Jumlah Pembayaran : <small>Diisi dengan rupiah penuh</small></p> <p>Terbilang : </p> <p></p>																										
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal </p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : </p>	<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p> , Tanggal </p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p> <p>Nama Jelas : </p>																									
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																										

DEPARTEMEN
KEUANGAN R.I.

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 22

☐ SPT Normal
☐ SPT Pembetulan Ke- _____

Masa Pajak
____ / ____

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :

2. Nama :

3. Alamat :

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Murah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/401 411122/100		
7.			
JUMLAH			

Terbilang

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☐ Daftar Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).

2. ☐ Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar
(Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).

3. ☐ SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar
(Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).

4. ☐ Daftar Bukti Pemungutan PPH Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

5. ☐ Bukti Pemungutan PPH Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).

6. ☐ Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).

7. ☐ Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

8. ☐ Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
☐ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama
NPWP

Tanda Tangan & Cap

Tanggal

Tanda Tangan

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima:
☐ Langsung dari WP
☐ Melalui Pos

tanggal

tanggal

bulan

tahun

Lampiran 7

		DEPARTEMEN KEUANGAN R.J. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22		Masa Pajak / /	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH y. Dipungu
(1)	(2)	(3)	Nomor (4)	Tanggal (5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
dst.						
JUMLAH						

<input type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK
Nama	
NPWP	

Tanggal		2	0
tanggal	bulan	tah	
Tanda Tangan & Cap			

Lampiran 8

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
		DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
KANTOR WILAYAH		KANTOR PELAYANAN PAJAK	
Telepon : (021) 7064431 - 7064439		Facsimile : (021) 7064440	
BUKTI PENERIMAAN SURAT			
Nomor : FPM-010006/74/017-000/2015 03-AUG-16 12:49			
Nama :	GUSA INFORMATIKA	N.P.W.P. :	00.527.123.0-007.000
Alamat :	JL. TERWATA RAYA BLOK F NO. 12 RT. 003 RW. 002 TAKUNG BARAT 00000	No. P.K.P. :	00.507.123.0-007.000
Jenis Pajak :	PPh Pasal 23	Ms/Thn Pajak :	12/2015
Jenis :	Perhitungan Pemindahankekayaan	Kasus Pengawasan dan Kemitatani I Tgl. Terima : 03-AUG-16	
Nilai :	PENDIKNW/PBK SEP Rp14.000.000,00	 Petugas penerima NIP : 1952102199700001	
KP. PDIP 3.16 - 96			



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Murbei Barat I - Sumurboto Semarang 50269 Telp. 024-7470086 Fax. 024-7462588 Email : jatengpemel_01@yahoo.com

Nomor : UM.01.03/SPJN.I-JTG/XI/2016 -15
Lampiran : -

Semarang, 22 November 2016

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang
di

Semarang

Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Kerja Praktek (Magang).


Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Nomor : 7018.33/UM7.3.2/PP/2016 Tanggal 17 November 2016 Perihal : Permohonan Ijin Kerja Praktek (Magang).

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa a.n Enngar Abimanyu NIM. 12030214060058 Jurusan Perpajakan (D III) **dijijinkan** untuk melakukan Kerja Praktek (Magang) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah.

mulai tanggal 2 Januari sd 31 Maret 2017, untuk itu kami minta kepada Mahasiswa atas nama tersebut untuk segera menghadap agar dapat diberikan arahan sebelum tanggal mulai Kerja Praktek (Magang).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n Kuasa Pengguna Anggaran / Barang
Asisten Umum, Keuangan dan Pelaporan


R. ABDUL HALIM, ST
NIP. 19840224 200912 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).
2. Peringgal.



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Murbei Barat I - Sumurboto Semarang Telp. 024-7470086 Fax. 024-7462588 Email : jatengpemel_01@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO. UM.01.03/SPJN.I-JTG/IV/2017 - 04

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SYAMSURIJAL, ST

NIP : 19730428 200911 1 001

Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Assisten Umum Keuangan dan Pelaporan.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Nomor : 7018.33/UM7.3.2/PP/2016 Tanggal 17 November 2016 Perihal : Permohonan Ijin Kerja Praktek (Magang), dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ENGGAR ABIMANYU

NIM : 12030214060058

Jurusan : PERPAJAKAN

Telah melaksanakan Praktek Kerja (Magang) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah. Praktek Kerja (Magang) tersebut telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 2 Januari s/d 31 Maret 2017.

Selama melakukan Praktek Kerja (Magang) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan Praktek Kerja (Magang) ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 April 2017
A/n Kuasa Pengguna Anggaran / Barang
Assisten Umum Keuangan dan Pelaporan

